

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Keberhasilan pencapaian target-target dalam Renstra ini merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari seluruh komponen di OPD dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Sekretaris, Kepala Bidang, Para Kasubbag, dan Para Kepala Seksi. Partisipasi aktif dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan DPRD juga sangat diperlukan untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Renstra ini, sehingga kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Benteng, 25 September 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,**

**SAPARUDDIN, S. Sos., M.M
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19760901 200502 1 004**

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal.
	Sampul	i
	Kata Pengantar	ii
	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel	v
	Daftar Bagan	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
	2.1. Gambaran Pelayanan Satpolpp, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Satpolpp, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	47
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
	3.1. Tujuan Renstra SatpolPP, Damkar dan Penyelamatan Tahun 2025-2029	51
	3.2. Sasaran SatpolPP, Damkar dan Penyelamatan Tahun 2025-2029	51
	3.3. Strategi SatpolPP, Damkar dan Penyelamatan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	55
	3.4. Telaahan Arah Kebijakan SatpolPP, Damkar dan Penyelamatan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	57
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
	4.1 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	59

4.2	Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	148
4.3	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Damkar dan Penyelamatan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	156
4.4	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	157
BAB V	PENUTUP	160

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 2.2 : Berdasarkan Bidang Tugasnya.....	36
Tabel 2.3 : Berdasarkan Pangkat \ Golongan.....	37
Tabel 2.4 : Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
Tabel 2.5 : Peralatan (Sarana dan Prasarana).....	38
Tabel 2.6 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan.....	44
Tabel 2.7 : Isu Strategis Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.....	50
Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	53
Tabel 3.2 : Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	57
Tabel 3.3 : Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	57
Tabel 4.1 : Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	61
Tabel 4.2 : Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan.....	114
Tabel 4.3 : Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	148
Tabel 4.4 : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	156
Tabel 4.5 : Indikator Kinerja Kunci.....	158
Tabel 4.6: Penetapan Target Indikator SPM	159

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi.....	35
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun sampai dengan 5 tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan tahun 2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahun) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun, organisasi perangkat daerah juga menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagai

proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rentsra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 dan ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun"

Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau yang disingkat Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen perencanaan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *top down*, *bottom up* maupun teknokratik. Pendekatan *top down* dilakukan sesuai dengan hierarki pemerintahan, dimana pada tahap awal Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan menampung berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintah kabupaten kepulauan selayar terkait dengan bentuk dukungan dalam penegakan perda, maupun pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan *bottom up* dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan penegakan perda, trantibum, linmas, dan pemadam kebakaran yang menjadi dasar bagi penetapan kebijakan teknis dan penyusunan program yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai bahan perumusan kebijakan strategi dan pendanaan. Selain itu, Fungsi Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai bahan dalam merumuskan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar (Pendekatan Teknoratis).

Adapun penyusunan dan penetapan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan RPJM, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- c. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;

- d. Penetapan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 – 2026 ini disusun berlandaskan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem

- Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5941);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta

Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 Nomor 113);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 35);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang RPJMD Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Nomor);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 676);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 – 2029, yaitu :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan

- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman untuk lebih memudahkan dalam memahami Renstra ini, maka penyusunan Renstra ini disusun dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan (Capaian SPM) dan Kelompok Sasaran Layanan; Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan; Sasaran; Strategi, dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang Uraian Program; Kegiatan; Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; IKU dan IKK Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan meliputi penegakan peraturan daerah dan kepala daerah, pemeliharaan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat (linmas), serta penanggulangan, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran dan nonkebakaran. Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada patroli, pembinaan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran, sementara pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan menangani pencegahan, penanganan dan evakuasi kebakaran dan nonkebakaran.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), berikut adalah gambaran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang tidak konsisten. Meskipun target selalu tercapai pada tahun 2021 (100% vs. target 90%), capaian kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 dan 2024, berada jauh di bawah target yang ditetapkan. Analisis ini menyoroti tantangan besar dalam upaya mencapai target penyelesaian pelanggaran K3 dan memerlukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja, terutama pada tahun 2024.

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan peningkatan yang positif, dari predikat "CC" (Cukup) pada periode 2020-2022 menjadi "B" (Baik) pada tahun 2023-2024. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di perangkat daerah tersebut, serta kemajuan dalam mewujudkan birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, kapabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian (rata-rata 26,06%) selalu berada di bawah target (rata-rata 26,23%) selama periode 2020-2024. Hal ini terjadi terutama akibat keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjangkau seluruh wilayah manajemen kebakaran.

Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), berikut adalah gambaran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan. Persentase penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) menunjukkan hasil yang sangat baik. Target capaian sebesar 100% berhasil dipenuhi setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan efektivitas tinggi dalam penanganan dan penyelesaian seluruh gangguan Trantibum yang dilaporkan.

Target yang ditetapkan untuk layanan penegakan hukum Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) berhasil tercapai penuh, yaitu 100% setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, melalui aparat penegak hukum seperti Satpol PP, berhasil memenuhi target layanan dalam menegakkan peraturan daerah.

Target persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ditetapkan 100% setiap tahunnya. Namun, capaiannya bervariasi dan cenderung berada di bawah target: 91,10% pada 2020, menurun menjadi 92,68% pada 2022, anjlok drastis menjadi 77,63% pada 2023, sebelum akhirnya naik kembali menjadi 85% pada 2024. Hambatan utama dalam pencapaian target ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta sulitnya medan untuk menjangkau lokasi kebakaran

Target waktu tanggap (response time) terhadap kebakaran selama periode 2020 hingga 2024 secara konsisten diturunkan setiap tahunnya, merefleksikan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan penanganan kebakaran. Capaian aktual menunjukkan fluktuasi, namun pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024, waktu tanggap berhasil lebih cepat dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan kinerja respons insiden kebakaran yang baik secara keseluruhan, meskipun ada tantangan di tahun tertentu (2023)

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Gambar 1 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 113); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47); dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana di dalamnya dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta

pemadam kebakaran adalah Menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan

- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Penegakan Perda, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Kerjasama dan
 - c. Kelompok Fungsional
5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Satuan menyelenggarakan

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum,

- perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Satuan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- h. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan
- i. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan.
- j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi

- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Satuan;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja Satuan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran.
- g. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Satuan;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
- k. melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- l. melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Satuan;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Satuan;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1 Sub bagian Program

Sub bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja. Uraian Tugas Kepala Sub bagian Program, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub bagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Satuan;
- g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Satuan;
- h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan;
- i. menyusun dokumen evaluasi satuan;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
- k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- l. memfasilitasi penjaringan Inovasi Daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Satuan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;

- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub bagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sub bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian Tugas Kepala Sub bagian umum, kepegawaian dan hukum, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- a. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- b. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- g. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- h. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- i. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- j. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;

- m. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Satuan;
- n. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- o. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- p. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- q. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Satuan;
- r. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai lingkup Satuan;
- s. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Satuan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Sub bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan. Uraian Tugas Kepala Sub bagian Keuangan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan;
- j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan;
- k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l. menyusun laporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Penegakan Perda

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang penegakan peraturan daerah memiliki fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Penegakan Peraturan Daerah;
- g. menyusun pedoman dan supervisi penegakan peraturan daerah;
- h. melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, penyuluhan, dan kerjasama penegakan peraturan daerah;
- i. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran peraturan daerah;
- j. melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- k. menyusun bahan kebijakan teknis penyuluhan peraturan daerah;
- l. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan peraturan daerah;
- m. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masing- masing bidang;
- n. melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar kegiatan yang dilakukan dalam penyuluhan peraturan daerah;
- o. melaksanakan optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar dan instansi terkait sesuai kebutuhan penyuluhan
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan.
- q. melaksanakan dan mengembangkan mekanisme kerja, tata kerja, dan metode penyuluhan sesuai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan Tugas
- r. melaksanakan koordinasi kegiatan penyuluhan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan instansi terkait

- s. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di bidang penegakan peraturan daerah
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- w. menyusun laporan pelaksanaan TugasBidang Penegakan Peraturan Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3.1 Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan. Uraian tugas kepala seksi pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembinaan dan pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan peraturan daerah;
- g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah;
- h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masing-masing bidang;

- i. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah;
- k. mengajukan usulan penindakan dan penertiban melalui kepala bidang dan diteruskan ke Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- l. melakukan koordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan dengan institusi terkait;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan. Uraian tugas kepala seksi penyelidikan dan penyidikan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah;

- g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah;
- h. melakukan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. melakukan pengembangan Kapasitas dan karier penyidik pegawai negeri sipil;
- k. melakukan dan mengajukan penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- l. menyusun rencana pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- m. menerima pelaporan dan melakukan evaluasi terhadap hasil penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan perkara dalam dilanjutkan ke pengadilan melalui koordinator wakil satuan PPNS;
- n. melakukan tindakan pencegahan, penghentian dan penyitaan barang terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan lainnya.
- o. melakukan koordinasi penyelidikan dan penyidikan pelanggar penegakan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan instansi terkait;
- p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan;
- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum. Kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum melaksanakan fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melaksanakan operasi penertiban dan pengendalian terhadap Pelanggaran Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional ketentraman, ketertiban, pengamanan acara protokoler dan obyek vital serta pengaduan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- j. melaksanakan perlindungan masyarakat, pelaksanaan kegiatan, pengerahan pengamanan (pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah), pengendalian dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana;

- k. melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- l. melaksanakan dan mempersiapkan perlindungan masyarakat guna mendukung pengamanan pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana;
- m. melaksanakan pertolongan, rehabilitasi dan relokasi akibat bahaya dan korban bencana
- n. menempatkan pos jaga dan pengamanan kesiagaan keamanan lingkungan.
- o. melaksanakan pengawasan pengendalian operasional kegiatan satuan perlindungan masyarakat
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- s. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakanTugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang Tugasnya

4.1 Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasi dan pengendalian. Uraian tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi Tugas dalam lingkungan Seksi Operasi dan Pengendalian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis operasi penertiban dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masing-masing bidang Dalam dilakukan operasi penertiban;
- i. melaksanakan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
- j. melaksanakan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- k. mengadakan Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;
- l. melakukan koordinasi kegiatan operasi dan pengendalian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait;
- m. mengordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis dibidang operasi dan pengendalian;
- n. melaksakan koordiansi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Kerjasama. Uraian Tugas Kepala Seksi Kerjasama, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan Kerjasama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
- i. menyusun standar operasional prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
- k. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan;
- l. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kerjasama dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;
- m. menganalisis penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama;
- n. melakukan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan sub unit kerja lain di lingkungan satuan serta dengan instansi terkait;
- o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kerjasama;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kerjasama dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemadam kebakaran dan Penyelamatan. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang pemadam Kebakaran, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. menyusun pedoman, petunjuk teknis inspeksi proteksi kebakaran, penyuluhan publik mengenai kebakaran, serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- h. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran

- j. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
- k. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- l. melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia.
- m. melaksanakan pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, penyelamatan.
- n. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pemadaman dan evakuasi
- o. melaksanakan pengawasan pengendalian operasional kegiatan Seksi Pemadaman dan Evakuasi
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- r. menilai kinerja pegawai aparaturnya sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5.1 Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan. Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- i. melaksanakan Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- j. melaksanakan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi;
- k. melakukan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- l. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan inspeksi proteksi kebakaran;
- m. melaksanakan pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, pengolahan data daerah rawan kebakaran.
- n. melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran seperti pengawasan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun yang mudah terbakar, penyelidikan sebab kebakaran, penegakan peraturan, dan lain-lain.
- o. melaksanakan pengawasan pengendalian operasional kegiatan inspeksi proteksi kebakaran;
- p. melaksanakan koordinasi kegiatan pencegahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan institusi terkait
- q. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pencegahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana. Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- g. menyusun rencana Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- h. menyusun Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan penyelamatan;
- i. melaksanakan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- j. melaksanakan Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- k. menyusun Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- l. melaksanakan Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan;
- m. menyusun rencana Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan;
- n. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan sarana dan prasarana;
- o. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk operasional peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;
- p. melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;

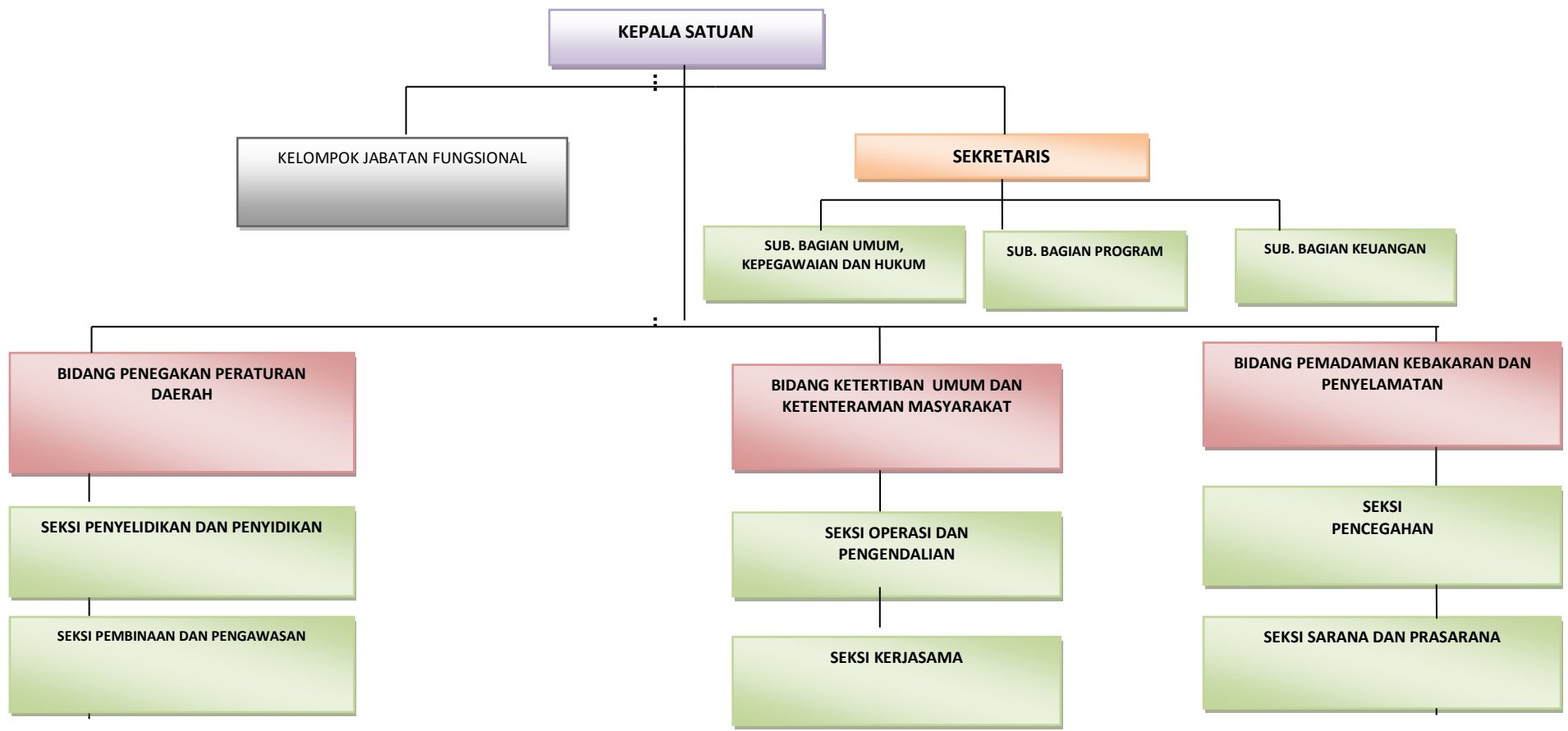
- q. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan/pemadaman/ penyelamatan kebakaran;
- r. melaksanakan koordinasi kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait;
- s. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi bagan 2.1 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :



2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas dan Pemberian Pelayanan pada masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan salah satu unsur Penunjang Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan, membutuhkan sumber daya manusia yang seharusnya melebihi standar.

Keadaan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan digambarkan sebagai berikut:

2.2.1.1 Berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1	Strata Dua (S2)	7 Orang	7 Orang PNS
2	Strata 1(S1)	54 Orang	17 Orang PNS, 35 Orang (NonPNS), 2 orang PPPK
3	D3	5 Orang	5 Orang NonPNS
4	D2	4 Orang	4 Orang Non PNS
5	SLTA/Sederajat	323 Orang	24 Orang (PNS), 261 Orang (NonPNS), 38 orang PPPK
6	Paket C	1 Orang	1 Orang PNS
7	Paket C	43 Orang	43 Non PNS
JUMLAH		437 Orang	

2.2.1.2 Berdasarkan bidang tugasnya

Table 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasnya Tahun 2024

No	Bidang Tugas	Jumlah	Ket
1.	Kepala Satuan	1 Orang	Pembina Tk.I /IV.b
2.	Sekretaris	1 Orang	Pembina/IV.a
3.	Kasubag Program	1 Orang	Penata / III.c
4.	Kasubag Keuangan	1 Orang	Penata Tk.I/ III.d
5.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	1 Orang	Penata/IIIc
6.	Kepala Bidang Penegakan Perda	1 Orang	Pembina /IV.a
7.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1 Orang	Penata /III.c

8.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	1 Orang	Penata Tk.I/III.d
9.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Orang	Pembina/IVa
10.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	1 Orang	Penata /III.c
11.	Kepala Seksi Kerjasama	1 Orang	Penata Tk.I/III.d
12.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	1 Orang	Penata Tk.I/III.d
13.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1 Orang	Penata Tk.I/III.d
14.	Kepala Seksi Pencegahan	1 Orang	Penata Tk.I/III.d
15.	Kepala Upt Bontomatene	1 Orang	Penata/IIIc
16.	Kepala Upt Bontosikuyu	1 Orang	Penata Tk.I/III.d
17.	Fungsional Tertentu	33 Orang	1 Pembina IV/a, 3 Penata Tk.I/III.d, 16 Penata Muda Tk.I/III.b, 6 Penata Muda III/a, 5 Pengatur Tk.I.II/d, 2 Pengatur/IIc,
18.	Penata Layanan Operasional Penata Trantibum	2 Orang	3 Golongan IX
19.	Pemadam Kebakaran	28 Orang	28 Golongan V
20.	Pemula	10 Orang	10 Golongan V
JUMLAH			89 Orang

2.2.1.3 Berdasarkan Pangkat/Golongan

Table 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2024

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Ket
1	Pembina Tk.I/ IV.b	1 orang	Kasat
2	Pembina/ IV.a	1 orang	Sekretaris
3	Pembina/ IV.a	3 orang	Kabid/Fungsional
4	Penata Tk.I/ III.d	10 orang	Kabid/Kasi/Kasubag/Fungsional/Kepala UPT
5	Penata / III.c	5 orang	Kasi/Kasubag/Kepala UPT
6	Penata Muda Tk. I/III.b	16 orang	Fungsional Tertentu
7	Penata Muda/ III.a	6 orang	Fungsional Tertentu
8	Pengatur Tk.I /II.d	5 orang	Fungsional Tertentu
9	Pengatur / II.c	1 orang	Fungsional Tertentu
10	Penata Layanan Operasional	2 orang	Golongan IX
13	Penata Trantibum	28 orang	Golongan V
14	Pemadam Kebakaran Pemula	10 orang	Golongan V
JUMLAH		89 orang	

2.2.1.4 Berdasarkan Jenis Kelamin

Table 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah	KET.
1	Laki-Laki	363 Orang	39 PNS, 289 Non PNS, 35 PPPK
2	Perempuan	74 Orang	10 PNS, 59 Non PNS, 5 PPPK
JUMLAH		437Orang	

2.2.1.5 Peralatan (Sarana dan Prasarana)

Dalam mendukung tugas administrasi dan operasional di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki sarana dan Prasarana, yaitu :

Tabel 2.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2023

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	8 unit	Baik
2	Truck + Attachment	1 unit	Baik
3	Pick Up	3 unit	2 Baik, 1 Rusak Berat
4	Mobil Pemadam	8 unit	6 Baik, 2 Rusak Berat
5	Mini Bus	2 Unit	Baik
6	Sepeda Motor	15 unit	Baik
7	P.C Unit/Komputer	11 unit	6 Baik, 5 Rusak Berat
8	Notebook	1 unit	Rusak Berat
9	Printer	28 unit	14 Baik, 14 Rusak Berat
10	Laptop	19 unit	16 Baik, 3 Rusak Berat
11	Meja Biro	30 unit	21 Baik, 9 Rusak Berat
12	Meja Kerja	45 unit	43 Baik, 2 Rusak Berat
13	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 unit	Baik
14	Kamera Elektronik	7 unit	4 Baik, 3 Rusak Berat
15	Lemari Arsip untuk Dinamis	12 unit	2 Baik, 10 Rusak Berat
16	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1 unit	Baik
17	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1 unit	Baik
18	Lemari Kayu	5 unit	1 Baik, 4 Rusak Berat
19	AC	11 unit	Baik
20	Pesawat Telpon	1 unit	Rusak Berat
21	Kursi Putar	21 Unit	4 Baik, 17 Rusak Berat
22	Kursi Tamu	1 unit	Rusak Berat
23	Televisi	9 unit	5 Baik, 4 Rusak Berat
24	Peralatan Antena UHF Lain-lain	1 unit	Baik

25	Lemari ES	1 unit	Baik
26	Kapal Patroli Pantai	2 Unit	Rusak Berat
27	Handy Talky (HT)	45 unit	14 Baik, 31 Rusak Berat
28	Alat Komunikasi Lain-lain	6 unit	6 Rusak Berat
29	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	2 unit	2 Rusak Berat
30	Power Suplai	1 unit	Rusak Berat
31	Kursi Rapat	214 unit	174 Baik, 40 Rusak Berat
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 unit	Baik
33	Dispencer	3 unit	Rusak Berat
34	Mesin Ketik Manual Standar (14 -16)	4 unit	Rusak Berat
35	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1 unit	Rusak Berat
36	Lemari Besi	8 unit	Baik
37	Rak Kayu	1 unit	Rusak Berat
38	Faxmile	1 unit	Rusak Berat
39	Brand Kas	1 unit	Baik
40	Lemari Kaca	1 unit	Baik
41	Kompor Gas	1 unit	Baik
42	Jam Elektronik	2 unit	Rusak Berat
43	Sofa	1 unit	Baik
44	Radio	5 unit	Rusak Berat
45	Sound Sistem	2 unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
46	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1 unit	Baik
47	Layar Proyektor	1 unit	Baik
48	Tameng Fiber/Mika	30 unit	28 Baik, 2 Rusak Berat
49	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit	Baik (Mako)
50	Filing Besi	5 unit	Baik
51	Mesin Absensi	1 unit	Baik
52	Kursi Lipat	10 unit	Rusak Berat
53	Megaphone	2 unit	Baik
54	Slide Proyektor	5 unit	3 Baik, Rusak Berat 2
55	Alat Keamanan (Tabung Apar)	10 unit	Baik
56	Alat Perlindungan Lain – lain (APAR 6 Kg)	8 unit	Baik
57	Lampu Sirine Tiga Warna	3 unit	Baik
58	Alat Perlindungan Lain –Lain (Baju Anti Api)	1 unit	Baik
59	Kursi Kerja	17 unit	Baik
60	Bangunan Gedung Kantor Lain – Lain (Bangunan Khusus Merokok)	4 unit	Mako Bontoharu Buki
61	Bangunan Gedung Kantor Lain – lain (Bak Penampung Air Pemadam Kebakaran)	2 unit	Mako
62	Mesin Pompa Air	5 unit	Baik

63	Alat Pemadam Kebakaran Lain- lain (Nozzel)	12 unit	Baik
64	Selang Penyemprot Air	7 unit	Baik
65	Selang Penghisap Air	2 unit	Baik
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik
67	Meja Kerja Pejabat Lain – lain	2 unit	Rusak Berat
68	Meja Rapat Pejabat Eselon III	6 unit	Baik
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 unit	Baik

Sebagaimana pemaparan di atas, ditinjau dari segi kuantitas terlihat bahwa jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan *belum memadai* mengingat bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta tanggap terhadap bencana kebakaran, yang lingkup tugasnya mencakup seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara semakin banyaknya Produk Hukum berupa Peraturan Daerah yang secara tidak langsung Penegakannya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Penegak Peraturan Daerah, yang mana tidak seimbang dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ditambah lagi tugas di bidang pemadam kebakaran yang harus siap siaga ketika kebakaran terjadi

2.1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan, mengutamakan indikator kinerja kunci dan standar pelayanan yang berorientasi pada keberhasilan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sehubungan dengan itu, penilaian kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh dari realisasi target yang telah ditetapkan. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, tentu sasaran/target capaian kinerja yang ditetapkan telah mengakomodasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum oleh perangkat daerah selama periode 2020-2024 mencapai 100%, baik dari target maupun realisasi. Rasio capaian yang juga 1,00 setiap tahunnya menunjukkan bahwa target tersebut selalu tercapai. Dukungan peraturan perundang-undangan yang memperkuat tupoksi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada menjadi faktor penting dalam pencapaian ini.

Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan target dan realisasi mencapai 100% setiap tahunnya selama periode 2020-2024. Rasio capaian sebesar 1,00 juga mengonfirmasi bahwa target tersebut selalu tercapai. Pada dasarnya, tidak ada warga negara yang terdampak selama melakukan penegakan perda dan perkada. Hal tersebut terjadi karena penegakan perda dan perkada dilakukan secara humanis dengan pendekatan persuasi.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun target Renstra Perangkat Daerah (2020-2024) adalah untuk mencapai angka penyelesaian antara 90% (2020) hingga 98% (2024), angka realisasi capaian justru menurun dari 43,2% pada tahun 2020 menjadi hanya 26% pada tahun 2024. Hal ini juga tercermin dari rasio capaian yang menurun dari 0,48 menjadi 0,26, yang menunjukkan bahwa pencapaian berada jauh di bawah target yang ditetapkan.

Masih rendahnya tingkat penyelesaian K3 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), rendahnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan perkada, serta maraknya tindak kriminalitas sebagai akibat dari kurang optimalnya sosialisasi perda dan perkada yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam penyelesaian K3, masih rendah karena kurangnya personil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP. Meskipun demikian, adanya koordinasi kerja sama yang baik antara TNI dan

Polri menjadi faktor pendukung dalam penyelesaian pelanggaran K3.

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencakup tiga aspek utama: Target Renstra Perangkat Daerah, Realisasi Capaian, dan Rasio Capaian, yang masing-masing ditandai dengan nilai 'B' dan 'CC' untuk periode 2020-2024. Secara sederhana, ini menunjukkan bahwa perangkat daerah menargetkan nilai 'B' dan 'CC' dalam reformasi birokrasi, dan realisasi serta rasio capaian juga berada pada kisaran nilai yang sama. Hal tersebut terjadi adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya.

Secara keseluruhan cakupan pelayanan bencana kebakaran berhasil mencapai target Renstra tahun 2020-2024 dengan sangat baik, dengan rasio capaian 0,99 yang menunjukkan pencapaian hampir 99% dari target yang ditetapkan. Target Renstra yang ditetapkan adalah 26,23% setiap tahunnya, dan realisasi capaiannya adalah 26,06% setiap tahunnya. Rasio capaian sebesar 0,99 ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang telah ditetapkan dalam periode tersebut.

Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Target Renstra Perangkat Daerah (2020-2024) adalah 100% setiap tahunnya, namun realisasi capaian menunjukkan penurunan dari 91,10% pada tahun 2020 menjadi 85% pada tahun 2024. Rasio capaian juga mengalami penurunan, dari 0,91 pada tahun 2020 menjadi 0,85 pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa target tidak tercapai. Penanganan bencana kebakaran terkendala oleh kurangnya sarana dan prasarana, seperti akses ke lokasi kejadian yang sulit dijangkau, terutama di wilayah kecamatan yang tidak memiliki pos pemadam kebakaran. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus untuk sertifikasi aparatur pemadam kebakaran menyebabkan rendahnya kualitas SDM personil damkar, sehingga pelayanan dan evakuasi korban belum optimal.

Secara keseluruhan, waktu tanggap (*respon time*) menunjukkan bahwa ada fluktuasi dalam pencapaian target, dengan realisasi waktu respons yang bervariasi dari tahun ke tahun. Meskipun ada penurunan target waktu respons yang ditetapkan oleh Renstra Perangkat Daerah (dari 12 menit menjadi 10,61 menit), pencapaiannya tidak selalu konsisten. Faktor-faktor yang

mempengaruhi realisasi capaian waktu tanggap (respon time) kebakaran antara lain lokasi kejadian yang sulit dijangkau dan cakupan wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang belum menyeluruh. Hal ini disebabkan karena belum semua kecamatan memiliki pos dan UPT Pemadam Kebakaran, sehingga waktu tempuh ke lokasi kejadian menjadi lebih lama.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3			98%	90%	90%	95%	95%	98%	43,2%.	100%	66,66%	75%	25%	0,48	1,11	0,70	0,79	0,26
4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			B	CC	CC	CC	B	B	CC	CC	CC	B	B	CC	CC	CC	B	B
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran			27,78	26,23 %	26,23 %	26,23 %	26,23%	26,23 %	26,06%	26,06 %	26,06 %	26,06 %	26,06 %	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	75		100%	100%	100%	100%	100%	91,10	92,19	92,68	77,63	85	0,91	0,92	0,93	0,78	0,85
7	Waktu tanggap (response time)		15		12	12	11,26	10,93	10,61	11,95	9,01	7,58	11,84	8,35	0,99	0,75	0,67	1,08	0,79

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pada dasarnya tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dimana pelayanannya berupa penertiban atas pelanggaran perda/perkada, penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran, kejadian yang membahayakan manusia serta penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun kelompok sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

1. Masyarakat Umum dan Kalangan Pengusaha

Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan terkait dengan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat umum termasuk juga pedagang kaki lima (PKL) dan pengusaha menjadi sasaran perencanaan strategis yang mencakup program-program penyuluhan, pembinaan, dan pemberdayaan serta pengaduan masyarakat untuk mendukung peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Pemerintah Daerah

Adapun pemberian layanan kepada pemerintah daerah berupa:

- a. pengamanan pejabat ketika kunjungan dinas ke Kabupaten Kepulauan Selayar
- b. pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi pemerintah yang membutuhkan
- c. pengamanan Objek Vital dan Event Daerah

3. Pihak Ketiga dan Instansi Swasta

Satpol PP dan Damkar sering berkolaborasi dengan pihak ketiga atau Instansi Swasta, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas, atau bahkan instansi pemerintah lain. Adapun layanan yang diberikan kepada pihak ketiga dan instansi swasta adalah:

- a. Pengamanan tamu penting dari pihak ketiga/swasta ketika kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi pemerintah.
- c. Pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi swasta yang membutuhkan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan mitra dalam memberikan pelayanan dalam menjalankan tugasnya sehingga ketenteraman dan ketertiban umum dapat terwujud. Kerjasama didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi. Adapun beberapa mitra kerja Satuan Polisi Pamong Praja antar lain :

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan TNI, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dan/atau instansi vertikal lainnya terkait Patroli Wilayah dan Penegakan hukum pelanggaran perda dan perkada.
2. Kerjasama dengan dinas lain seperti BPKPD, Disdagkum, Dinas Pertanian, DLH, DistanKP, BPBD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam melaksanakan penegakan perda dan perkada.
3. Bermitra dengan Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas Desa/Kecamatan dalam menjaga lingkungan masyarakat seperti pengamanan Pilkada yang bertujuan menjaga stabilnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.
4. Bermitra dengan Dinas perhubungan terkait lalu lintas dalam kegiatan Pengamanan dan Pengawalan tamu pejabat, dan acara-acara besar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Satpolpp, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.2.1 Permasalahan pelayanan Satpolpp, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan hasil evaluasi di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana masih terdapat masalah-masalah yang menghambat jalannya tugas pokok serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan pondasi yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu pengembangan kapasitas aparat satuan polisi pamong praja, sat linmas, dan personil pemadam kebakaran sangat di perlukan dalam menyelenggarakan ketentram dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dari 89 orang ASN Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, hanya 43 orang yang telah mengikuti diklat dasar Satpol PP, baik di Lantamal IV maupun di Kodim Selayar. Dari 349 orang Non ASN, hanya 123 orang yang telah mengikuti diklat dasar. Akan tetapi personil damkar belum ada yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran.
- b. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada), memerlukan upaya peningkatan melalui sosialisasi, penegakan, dan pengawasan kepatuhan terhadap perda/perkada, serta penanganan pelanggaran perda/perkada. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai tim penegak perda dan perkada juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi.
- c. Sarana dan Prasarana

Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana khususnya armada kebakaran dalam menangani bencana kebakaran menyebabkan terbatasnya kemampuan anggota damkar memenuhi waktu tanggap (*respon time*) ketika terjadi bencana kebakaran.
- d. POS Damkar dan UPT Damkar

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran belum merata di semua wilayah kecamatan, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal.

2.2.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7

Isu Strategis Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya sumber daya manusia (SDM)	Pemenuhan Pelayanan Dasar		Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan jumlah personil yang berkualitas PPNS dan peningkatan kapasitas pemadam kebakaran untuk memenuhi pelayanan bidang trantibum
	Belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan kepala daerah	Tata Kelola Pemerintahan		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal	Penguatan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga dalam rangka penegakan PERDA dan PERKADA
	Terbatasnya sarana dan prasarana khususnya dukungan armada kebakaran	Perubahan iklim dan mitigasi bencana		Krisis Lingkungan	Perubahan Iklim dan Risiko Bencana	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk optimalisasi investigasi dan evakuasi bencana kebakaran
	Keberadaan Pos Damkar dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran belum merata di semua wilayah kecamatan	Perubahan iklim dan mitigasi bencana		Krisis Lingkungan	Perubahan Iklim dan Risiko Bencana	UPT atau POS pemadam kebakaran sesuai WMK

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar telah banyak mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan merupakan penjabaraan atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan mencakup pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar turut mendukung tercapainya visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu **“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”**. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu “Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Mengarah pada Kondisi yang Aman dan Kondusif”

3.2 Sasaran SatpolPP, Damkar dan Penyelamatan Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten

Kepulauan Selayar untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara.
2. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan rencana jangka menengah daerah pemerintah kabupaten kepulauan selayar, maka satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kepulauan selayar pada periode 5 (lima) tahun ke depan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya dan pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 beserta indikator kerjanya yang dimuat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NPSK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 1: Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif Sasaran 1: Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Mengarah pada Kondisi yang Aman dan Kondusif		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	95%	95%	98%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan (S-1)	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	72,2	75	77	79	80	81	
			Nilai SAKIP Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	B (68,43)	B (68,50)	BB (75,68)	BB (75,70)	BB (75,75)	BB (75,80)	
Misi 6: Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama Sasaran 17: Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara (S-2)	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	95%	95%	98%	100%	100%	100%	

<p>Misi 7: Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p> <p>Sasaran 19: Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim</p>		<p>Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (S-3)</p>	<p>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran</p>	<p>26,23%</p>	<p>26,46%</p>	<p>27,78%</p>	<p>34,85%</p>	<p>35,29%</p>	<p>35,45%</p>	
--	--	---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

3.3 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menjelaskan bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan analisis SWOT yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar :

FAKTOR INTERNAL :

a. KEKUATAN (*Strengths*), Antara Lain terdiri dari :

1. Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
2. Adanya dukungan terhadap PPNS
3. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
4. Meningkatnya penanganan kebakaran dan non kebakaran

b. KELEMAHAN (*Weaknesses*), Antara Lain terdiri dari :

1. Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
2. Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompentensi PPNS
3. Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran

FAKTOR EKSTERNAL :

a. PELUANG (*Opportunities*), Antara Lain terdiri dari :

1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan
2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah kepulauan Selayar atau daerah lain

3. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
 4. Memberdayakan masyarakat dalam penanganan dini kebakaran
- c. ANCAMAN (*Threats*) , Antara Lain terdiri dari :
1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Penegakan Perda
 2. Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkara
 3. Adanya potensi gangguan trantibum
 4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap cara penanggulangan dini kebakaran
 5. Kurangnya pos pemadam kebakaran
 6. Adanya potensi bencana kebakaran

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat dirumuskan Strategi yang akan dijalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Penanganan gangguan pelanggaran keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Melaksanakan penegakan perda dan perkara secara yustisi dan non yustisi dengan mengedankan pendekatan persuasif;
 4. Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Anggota Satpol PP dan Damkar	Meningkatkan sarana dan prasarana penegakan perda dan perkada serta pemadam kebakaran	Meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan penegakan perda dan perkada serta penanggulangan kebakaran	Meningkatkan penyelamatan, evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan nonkebakaran

3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerapkan arah kebijakan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO.	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penegakan perda dan perkada	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;	Meningkatnya dan pengembangan kapasitas Anggota Satpol PP	
2.			Meningkatnya dan pengembangan kapasitas PPNS	
3.			Meningkatnya penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	
4.			Meningkatnya pemantauan dan	

			pengendalian terhadap penerapan peraturan daerah serta pemberdayaan masyarakat taat hukum	
5.	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		Meningkatnya pembinaan dan pemantapan informasi berbagai produk hukum dalam kehidupan sosial masyarakat guna terciptanya aparatur dan masyarakat sadar hukum	
6.	Perlindungan masyarakat		Meningkatnya perlindungan masyarakat dengan meminimalisir gangguan serta pelanggaran hukum	
.7.	Penanggulangan kebakaran	Meningkatkan ketangguhan manusia masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan dan bencana	Meningkatnya kapasitas anggota damkar sesuai permendagri Nomor 16 Tahun 2009	
8.			Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam pengaduan bencana kebakaran	
9.			Meningkatnya sarana dan parasarana pendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025-2029 yang telah di uraikan tersebut, akan diimplementasikan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program tersebut diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Berdasarkan uraian program diatas, berikut uraian kegiatan dalam program tersebut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - c. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1: Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif Sasaran 1: Meningkatkan birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Mengarah pada Kondisi yang Aman dan Kondusif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah	Terukurnya pelaksanaan anggaran OPD	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terukurnya kinerja OPD	Persentase Capaian Kinerja OPD		
				Terukurnya capaian IKK OPD	Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD		
			Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Dokumen	Terlaksananya penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	

			RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Tersedianya penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersedianya walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Tersedianya data statistik sektoral daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

				Daerah	Lingkup Perangkat Daerah		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai hasil forum perangkat daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
			Meningkatnya partisipasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu	Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
			Tercapainya Sinkronisasi	Tercapainya Sinkronisasi dan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka	

			dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
			Tersedianya laporan pengelolaan keuangan sesuai Ketentuan	Terlaksananya penyusunan laporan pengelolaan keuangan sesuai Ketentuan	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Terealisasinya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya penyusunan dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

			Verifikasi Keuangan SKPD	keuangan SKPD			
			Tersedianya dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwu	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

			lanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Tersedianya penyusunan dokumen/laporan layanan administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen/laporan layanan administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik	Terlaksananya penyusunan Rencana Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

			Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD			
			Teredianya dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Tersedianya laporan Rekonsiliasi dan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD	pada SKPD		
			Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya layanan administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Tersedianya	Terlaksananya	Jumlah Paket	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	

			Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Atribut Kelengkapannya	
			Tersedianya dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Tersedianya data Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
			Tersedianya	Terlaksananya	Jumlah Laporan Hasil	Pemulangan Pegawai yang	

			Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakannya Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
			Tersedianya data asn yang dipindahtugaskan	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	
			Meningkatnya kapasitas pegawai	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	
			Meningkatnya pengetahuan terkait Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Tersedianya	Terlaksananya	Persentase	Administrasi Umum Perangkat	

			pelayanan administrasi umum perangkat daerah	pelayanan administrasi umum perangkat daerah	pemenuhan administrasi umum kantor	Daerah	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersedianya Bahan	Terlaksananya penyediaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

			Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
			Tersedianya Bahan/Material	Terlaksananya penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
			Terlayannya tamu yang berkunjung	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Tersedianya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Alat Besar	Terlaksananya pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
			Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Terlaksananya pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
			Tersedianya Mebel	Terlaksananya pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan	Terlaksananya pengadaan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

			Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Disediakan		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud Lainnya	Terlaksananya pengadaan Aset Tak Berwujud Lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

				Lainnya			
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyusunan laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan laporan	Terlaksananya penyusunan laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyusunan laporan penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Umum Kantor			
			Terpeliharanya barang milik daerah peunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah peunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah peunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terpeliharanya Alat Besar	Tersedianya Jasa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	

				Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	dan Dibayarkan Perizinannya	Alat Besar	
			Terpeliharanya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
			Terpeliharanya mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			Terpeliharanya Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
			Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

				Bangunan Lainnya			
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terpeliharanya Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
Misi 6: Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Sasaran 17: Meningkatkan		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara (S-2)	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Terlaksananya penegakan perda dan perkara	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya penanganan	Terselenggaranya tibumtranmas			Persentase Penyelenggaraan

ya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpan gan dan penyakit			gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat	Terselenggaranya perlindungan masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Terlaksanyanya peningkatan kompetensi PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban yang ditangani	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/	Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	

			Kota				
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
			Terjalannya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan Kejahatan			
			Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Terlaksananya penyusunan Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi PamongPraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PungSIONal Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
			Tersedianya SK Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol	Terlaksananya Tim Penilai angka kredit Dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	

			PP				
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
			Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	

				Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
			Menurunnya Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Terlayannya masyarakat yang terkena Dampak Penegakan Perda dan	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	

			Perkada	Penegakan Perda dan Perkada			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/ Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya pembentukan Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
			Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	

				Legal			
			Tersedianya Dokumen SOP penanggulangan kebakaran Dan penyelamatan	Terlaksananya penyusunan Dokumen SOP penanggulanga n kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
			Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Terlaksananya penyusunan Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraan dan ketertiban Umum	Terlaksananya penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraa n ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	

				Umum			
			Tersedianya Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang indeks Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
			Menurunnya Pelanggaran Perda	Terlaksananya Penegakan Daerah Kabupaten /kota dan peraturan bupati/walikota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

			Terbinanya Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan DanPenyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Tersedianya Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
			Tersedianya Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

			Kepala Daerah				
			Tersedianya Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
			Tersedianya Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

			kepala Daerah Sesuai SOP				
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Terimplementasinya Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	
			Meningkatnya pembinaan PPNS	Terlaksananya Pembinaan Penyidik	Persentase Pembinaan Penyidik	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Sekretariat PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang	Pembentukan Sekretariat PPNS	

					Pembentukan Sekretariat PPNS		
			Terjalinnnya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
			Terbentuknya PPNS Penegak Peraturan Daerah	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			Tersedianya Operasional Sekretariat PPNS	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
			Meningkatnya kapasitas dan karir PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	

<p>Misi 7: Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p> <p>Sasaran 18: Meningkatkan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</p>		Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanganan bencana kebakaran di Wilayah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	<p>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</p>	
		Manajemen Kebakaran (S-3)	Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran		
			Meningkatnya layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

			Meningkatnya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaa Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamata/Evakuasi Korban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	

				Kebakaran dan Non Kebakaran	Kebakaran dan Non Kebakaran		
			Meningkatnya layanan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

			Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	(Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Legal		
			Meningkatnya pengetahuan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Terkelolanya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	

				Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		
			Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Terlaksananya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Meningkatnya kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	
			Tersedianya Dokumen	Terlaksananya penyusunan	Jumlah Dokumen Kajian	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan	

			Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Tersedianya Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	
			Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

			Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Terkait		
			Terselenggaranya Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Meningkatnya Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
			Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana	Terlaksananya penyusunan Dokumen Kajian Akademis	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	

			Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Lega	Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Lega	Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		
			Terselenggaranya Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Tertanganinya Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

			dalam Daerah Kabupaten/Kota	dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
			Meningkatnya Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	

			Kebakaran	Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran			
			Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran/ Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran/ Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran/ Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

				Kabupaten/ Kota			
			Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Peralatan Proteksi kebakaran yang di Inspeksi	Terlaksananya inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran yang di Inspeksi	Persentase Peralatan Proteksi kebakaran yang di Inspeksi	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana	Terlaksananya penyusunan Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	

			Prasarana Proteksi Kebakaran	Prasarana Proteksi Kebakaran	Proteksi Kebakaran		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya penyusunan Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Meningkatnya kompetensi teknis aparatur di	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	

			bidang pencegahan	yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		
			Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya penyusunan Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang di Investigasi	Investigasi Kejadian Kebakaran	
			Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian penyebab kejadian	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	

			kebakaran	Penyebab Kejadian Kebakaran			
			Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya penyusunan Laporan yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			Meningkatnya kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	
			Tersedianya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Terlaksananya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	
			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan Pemberdayaan dalam pencegahan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	

			dalam Pencegahan Kebakaran	dalam Pencegahan Kebakaran	Kebakaran		
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Tersedianya Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam	Tersedianya Dokumen yang memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	

			Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dukungan Sarana dan Prasarana			
			Meningkatnya pemahaman warga sebagai Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	
			Terciptanya Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
			Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	

				Masyarakat setiap tahunnya	Tahunnya		
			Terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksananya Penyelamatan Kejadian yang membahayakan keselamatan manusia	Persentase Penyelamatan Kejadian yang membahayakan keselamatan manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	

			Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Terlaksananya penyusunan Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
			Meningkatnya pengetahuan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Pen	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	

			yelamatan dan Evakuasi	Sah dan Legal			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
			Meningkatnya layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemadam	Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	

			Kebakaran sesuai standar	Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		
			Teridentifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	
			Terkelolanya Sistem Komunikasi	Tersedianya Sistem Komunikasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	

			dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat	Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat		
--	--	--	---	--	--	--	--

Tabel 4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

NO	BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
I	BIDANG URUSAN KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
	Outcome : Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pemerintahan	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	97.81%	93,50	10,137,011,100	94,50	9,807,427,400	95,50	8,660,647,400	96,50	8,806,057,200	97,50	8,823,285,800	98,50	10,563,277,400	
		Persentase Capaian Kinerja OPD	61,80%(B)	88,50		89,50		90,50		91,50		92,50		93,50		
a	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	output : Tersusunnya Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu	Persentase dokumen/laporan perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu		100%	28,428,400	100%	54,703,000	100%	45,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	80,000,000	
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
	output : Terlaksananya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2,533,700.00	2 Dokumen	12,367,500.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	15,000,000.00	
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
	output : Tersedianya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,350,000.00	1 Dokumen	4,034,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2,187,500.00	1 Dokumen	3,852,500.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	

4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,482,500.00	1 Dokumen	3,877,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00		
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD															
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	1,841,100.00	1 Dokumen	3,888,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,298,500.00	1 Laporan	4,534,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00		
7	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	14,735,100.00	3 Laporan	22,150,000.00	3 Laporan	10,000,000.00	3 Laporan	20,000,000.00	3 Laporan	20,000,000.00	3 Laporan	30,000,000.00		
8	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah															
	output : Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
9	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah															
	output : Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorsl Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		Data		Data		Data		Data		Data		Data	
10	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

	output : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Berita Acara		Berita Acara		Berita Acara		Berita Acara		Berita Acara		Berita Acara		
11	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
12	Sub Kegiatan : Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu																
	output : Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang diampu	Jumlah Substansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			Substansi		Substansi		Substansi		Substansi		Substansi		Substansi		
13	Sub Kegiatan : Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																
	output : Tersedianya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			Berita Acara		Berita Acara		Berita Acara		Berita Acara		Berita Acara		Berita Acara		
b	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan sesuai Ketentuan	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu			100%	5,744,311,330	100%	5,010,413,440	100%	5,018,707,440	100%	5,018,707,440	100%	5,018,707,440	100%	5,028,707,440	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			89 Orang/Bulan	5,732,604,230.00	89 Orang/Bulan	4,998,707,440.00	89 Orang/Bulan	4,998,707,440.00	89 Orang/Bulan	4,998,707,440.00	89 Orang/Bulan	4,998,707,440.00	89 Orang/Bulan	4,998,707,440.00	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																

	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	2,846,200.00	12 Dokumen	2,846,000.00	12 Dokumen	5,000,000.00	12 Dokumen	5,000,000.00	12 Dokumen	5,000,000.00	12 Dokumen	10,000,000.00	
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
	output : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	1,860,000.00	1 Dokumen	1,860,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
	output : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	
6	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	
7	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	5,000,900.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	
8	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	output : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	

c	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen/laporan layanan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu			100%	17,941,000	100%	38,292,500	100%	15,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	41,460,000
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
	output : Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-
2	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
	output : Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD															
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan			Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	
4	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD															
	output : Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			Laporan	34,460,000	Laporan	10,000,000	Laporan	20,000,000	Laporan	20,000,000	Laporan	34,460,000
5	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
	output : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	3,832,900.00		1 Laporan	3,832,500.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	7,000,000.00
6	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
	output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	14,108,100.00		Laporan	-	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	-
7	Sub Kegiatan : Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD															

	output : Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-
d	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
	output : Terlaksananya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik		100%	47,176,000	100%	46,575,000	100%	30,200,000	100%	50,200,000	100%	50,200,000	100%	66,375,000
1	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
	output : Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Unit		Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit	-
2	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
	output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket		Paket	-	Paket		Paket		Paket		Paket	-
3	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
	output : Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	9,652,200.00	1 Dokumen	10,200,000.00	1 Dokumen	10,200,000.00	1 Dokumen	10,200,000.00	1 Dokumen	10,200,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
	output : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000
5	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
	output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12 Dokumen	37,523,800.00	12 Dokumen	36,375,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	12 Dokumen	25,000,000.00	12 Dokumen	25,000,000.00	12 Dokumen	36,375,000.00
6	Sub Kegiatan : Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
	output : Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan		Pegawai		Pegawai		Pegawai		Pegawai		Pegawai		Pegawai	
7	Sub Kegiatan : Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
	output : Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	
8	Sub Kegiatan : Pemindahan Tugas ASN														

	output : Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan		ASN		ASN		ASN		ASN		ASN		ASN	
9	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
	output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	
10	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan														
	output : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	
11	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
	output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	
e	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	output : Terlaksananya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor		100%	318,395,400	100%	562,423,500	100%	424,837,560	100%	425,247,360	100%	442,475,960	100%	575,000,000
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	output : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 Paket	19,948,000.00	6 Paket	19,948,000.00	6 Paket	19,948,000.00	6 Paket	20,000,000.00	6 Paket	20,000,000.00	6 Paket	25,000,000.00
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	output : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan		6 Paket	5,633,800.00	6 Paket	19,312,000.00	6 Paket	15,000,000.00	6 Paket	18,000,000.00	6 Paket	18,000,000.00	6 Paket	25,000,000.00
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
	output : Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

	output : Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket	
5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
	output : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13,111,000.00	12 Paket	19,878,500.00	12 Paket	15,000,000.00	12 Paket	18,000,000.00	12 Paket	18,000,000.00	12 Paket	20,000,000.00	
6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
	output : Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4,200,000.00	12 Dokumen	4,200,000.00	12 Dokumen	3,000,000.00	12 Dokumen	3,000,000.00	12 Dokumen	3,000,000.00	12 Dokumen	5,000,000.00	
7	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material														
	output : Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan													
8	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu														
	output : Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	-	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	-	
9	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	275,502,600.00	12 Laporan	499,085,000.00	12 Laporan	371,889,560.00	12 Laporan	366,247,360.00	12 Laporan	383,475,960.00	12 Laporan	500,000,000.00	
10	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
	output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	
11	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
	output : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
f	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	output : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100%	6,921,300	100%	50,625,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	578,528,000	

1	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	1 Unit	513,528,000	
2	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
	output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Unit		
3	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Besar															
	output : Terlaksananya Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Unit		
4	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor															
	output : Terlaksananya Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Unit		
5	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel															
	output : Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1 Paket	28,491,000.00	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	35,000,000.00		
6	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Unit		
7	Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya															
	output : Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Unit		
8	Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tak Berwujud															
	output : Terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud Lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Unit		
9	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	output : Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Unit		
10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	output : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6,921,300.00	5 Unit	22,134,000.00	5 Unit	15,000,000.00	5 Unit	15,000,000.00	5 Unit	15,000,000.00	5 Unit	30,000,000.00		
11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

	output : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
g	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	3,433,387,670	100%	3,483,784,960	100%	2,826,902,400	100%	2,826,902,400	100%	2,826,902,400	100%	3,513,206,960
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	14,123,800.00	12 Laporan	10,001,000.00	12 Laporan	10,000,000.00	12 Laporan	10,000,000.00	12 Laporan	10,000,000.00	12 Laporan	15,000,000.00
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	111,549,500.00	12 Laporan	175,577,000.00	12 Laporan	175,577,000.00	12 Laporan	175,577,000.00	12 Laporan	175,577,000.00	12 Laporan	200,000,000.00
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	3,307,714,370.00	12 Laporan	3,298,206,960.00	12 Laporan	2,641,325,400.00	12 Laporan	2,641,325,400.00	12 Laporan	2,641,325,400.00	12 Laporan	3,298,206,960.00
h	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	output : Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	540,450,000	100%	560,610,000	100%	265,000,000	100%	370,000,000	100%	370,000,000	100%	680,000,000
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

	output : Tersedianya Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	39,270,000.00	3 Unit	39,270,000.00	3 Unit	30,000,000.00	3 Unit	35,000,000.00	3 Unit	35,000,000.00	3 Unit	45,000,000.00
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
	output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		17 Unit	449,180,000.00	17 Unit	449,180,000.00	17 Unit	200,000,000.00	17 Unit	300,000,000.00	17 Unit	300,000,000.00	17 Unit	550,000,000.00
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
	output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
	output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
5	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel														
	output : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
6	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
7	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
	output : Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
8	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
	output : Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
9	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

	output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	35,720,000.00	1 Unit	49,020,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	60,000,000.00
10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
	output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		51 Unit	16,280,000.00	51 Unit	23,140,000.00	51 Unit	15,000,000.00	51 Unit	15,000,000.00	51 Unit	15,000,000.00	51 Unit	25,000,000.00
11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
	output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
12	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
	output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		Ha		Ha		Ha		Ha		Ha		Ha	
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75%	75%		80%		80%		90%		90%		100%	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibunmas	97%	75%	599,896,500	100%	482,470,000	100%	493,665,200	100%	504,220,900	100%	482,624,600	100%	507,380,600
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	0.63	0.63%		0.63%		0.63%		0.63%		0.63%		0.63%	
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	50		50		50		50		50		50	
a	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	output : Menurunnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban yang ditangani		97%	60,311,500	97%	90,000,500	97%	101,195,700	97%	111,751,400	97%	90,155,100	97%	111,751,400
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														

	output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
2	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
	output : Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	5,001,000.00	1 Dokumen	5,001,000.00	1 Dokumen	5,001,000.00	1 Dokumen	15,556,700.00	1 Dokumen	5,155,600.00	1 Dokumen	15,556,700.00	
3	Sub Kegiatan : Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
	output : Terlaksananya Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
4	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat														
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
5	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional														
	output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		

6	Sub Kegiatan : Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP															
	output : Terlaksananya Tim Penilaian Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
7	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan															
	output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		
8	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat															
	output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		
9	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan															
	output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		
10	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan															

	output : Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan KetenteramandanKetertiban UmumyangDicegahMelalui DeteksiDini danCegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		4 Dokumen	54,211,000.00	4 Dokumen	80,000,000.00	4 Dokumen	80,000,000.00	4 Dokumen	80,000,000.00	4 Dokumen	80,000,000.00	4 Dokumen	80,000,000.00
11	Sub Kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
	output : Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan KetenteramandanKetertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		5 Laporan	1,099,500.00	5 Laporan	4,999,500.00	5 Laporan	16,194,700.00	5 Laporan	16,194,700.00	5 Laporan	4,999,500.00	5 Laporan	16,194,700.00
12	Sub Kegiatan : enyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
	output : Tersedianya Pelayanan dasar Kepada warga Negara yang terkena Dampak Pegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan LayananDampak Pegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		1 Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-
13	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban														
	output : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
14	Sub Kegiatan : Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota														
	output : Terlaksananya Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
15	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														

	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
16	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan														
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
17	Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
18	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum														
	output : Terlaksananya Penyediaan Layanan Informasi dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
19	Sub Kegiatan : Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota														
	output : Terlaksananya Penyelenggaraan Trantibum di Daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	

20	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja															
	output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas		orang		orang		orang		orang		orang		orang		
b	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota															
	output : Terlaksananya Penegakan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda		90%	402,010,700	90%	323,719,500	90%	323,719,500	90%	323,719,500	90%	323,719,500	90%	326,879,200	
1	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
	output : Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		
2	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
	output : Tersusunya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
3	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)															
	output : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah		Unit		1 Unit	30,208,000.00	1 Unit	30,208,000.00	1 Unit	30,208,000.00	1 Unit	30,208,000.00	1 Unit	30,208,000.00	
4	Sub Kegiatan : Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															

	output : Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		5 Laporan	1,349,700.00	5 Laporan	17,300,000.00	5 Laporan	17,300,000.00	5 Laporan	17,300,000.00	5 Laporan	17,300,000.00	5 Laporan	17,300,000.00	
5	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah															
	output : Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		5 Laporan	9,000,000.00	5 Laporan	19,830,000.00	5 Laporan	19,830,000.00	5 Laporan	19,830,000.00	5 Laporan	19,830,000.00	5 Laporan	19,830,000.00	
6	Sub Kegiatan : Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah															
	output : Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyelidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda		Dokumen		5 Dokumen	8,793,500.00	5 Dokumen	8,793,500.00	5 Dokumen	8,793,500.00	5 Dokumen	8,793,500.00	5 Dokumen	11,953,200.00	
7	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
	output : Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1Laporan	150,808,900	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
8	Sub Kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota															
	output : Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		18 Laporan	90,946,100.00	18 Laporan	122,462,000.00	18 Laporan	122,462,000.00	18 Laporan	122,462,000.00	18 Laporan	122,462,000.00	18 Laporan	122,462,000.00	
9	Sub Kegiatan : Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota															
	output : Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		15 Laporan	149,906,000.00	15 Laporan	125,126,000.00	15 Laporan	125,126,000.00	15 Laporan	125,126,000.00	15 Laporan	125,126,000.00	15 Laporan	125,126,000.00	

10	Sub Kegiatan : Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada															
	output : Terlaksananya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-
c	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		100%	137,574,300	100%	68,750,000	100%	68,750,000	100%	68,750,000	100%	68,750,000	100%	68,750,000	100%	68,750,000
	output : Terlaksananya Pembinaan Penyidik	Persentase Pembinaan Penyidik														
1	Sub Kegiatan : Pembentukan Sekretariat PPNS															
	output : Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-
2	Sub Kegiatan : Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah															
	output : Terlaksananya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	46,605,000	1 Dokumen	46,605,000	1 Dokumen	46,605,000	1 Dokumen	46,605,000	1 Dokumen	46,605,000	1 Dokumen	46,605,000
3	Sub Kegiatan : Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah															
	output : Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	99,743,400	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-
4	Sub Kegiatan : Dukungan Operasional Sekretariat PPNS															
	output : Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	37,830,900.00	1 Laporan	22,145,000.00	1 Laporan	22,145,000.00	1 Laporan	22,145,000.00	1 Laporan	22,145,000.00	1 Laporan	22,145,000.00	1 Laporan	22,145,000.00
5	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS															
	output : Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan		Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-

d	Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota															
	output : Persentase Satgas daerah di Kabupaten/Kota		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota															
	output : Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan		Kegiatan		Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-
2	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota															
	output : Jumlah Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan		Kegiatan		Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-
C	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	85%	75	292,942,400	75	302,038,600	80	333,360,400	85	336,795,300	90	323,142,700	100	333,634,900	
	Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di wilayah kabupaten/kota	Waktu tanggap (Respon time) penanganan kebakaran	8.35	15		15		15		15		15		15		
a	Program : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															

	output : Terlaksananya Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan PenyidikPersentase Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan															
				80%	213,099,450	80%	214,736,950	80%	236,058,750	80%	239,493,650	80%	225,841,050	80%	236,333,250		
1	Sub Kegiatan : Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
	output : Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		12 Dokumen	27,338,150	12 Dokumen	20,000,000.00	12 Dokumen	21,321,800.00	12 Dokumen	21,321,800.00	12 Dokumen	21,104,100.00	12 Dokumen	21,596,300.00		
2	Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
	output : Tersedianya Laporan Hasil pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 Laporan	92,738,800	12 Laporan	90,049,800.00	12 Laporan	90,049,800.00	12 Laporan	90,049,800.00	12 Laporan	90,049,800.00	12 Laporan	90,049,800.00		
3	Sub Kegiatan : Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																
	output : Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		12 Dokumen	52,690,600	12 Dokumen	57,213,000.00	12 Dokumen	67,213,000.00	12 Dokumen	70,647,900.00	12 Dokumen	57,213,000.00	12 Dokumen	67,213,000.00		
4	Sub Kegiatan : Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
	output : Tersedianya Dokumen Hasil pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			

5	Sub Kegiatan : Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																
	output : Terlaksannya Penyusunan Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah dan legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	4 Dokumen	24,131,900	4 Dokumen	18,574,150	4 Dokumen	28,574,150	4 Dokumen	28,574,150	4 Dokumen	28,574,150	4 Dokumen	28,574,150	4 Dokumen	28,574,150	
6	Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																
	output : Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		
7	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																
	output : Tersedianya sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa secara diperbaharui atau diMutakhirkan secara berkala (setiap tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap tahunnya.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		
8	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)																
	output : Terlaksananya dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
9	Sub Kegiatan : Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran																
	output : Peningkatan Kompetensi Pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran															

10	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)															
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
11	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran															
	output : Terlaksananya Kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
12	Sub Kegiatan : Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan															
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
13	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran															
	output : Terlaksananya Kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
14	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri															
	output : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		3 Unit	16,200,000	3 Unit	28,900,000.00	3 Unit	28,900,000.00	3 Unit	28,900,000.00	3 Unit	28,900,000.00	3 Unit	28,900,000.00	
15	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran															

	output : Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
16	Sub Kegiatan : Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga														
	output : Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga	
17	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan dan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
18	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
	output : Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
19	Sub Kegiatan : Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

	output : Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan		
20	Sub Kegiatan : Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan															
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		
21	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran															
	output : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi			Orang			Orang			Orang			Orang		
22	Sub Kegiatan : Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota															
	output : Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran/ Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/ Penanggulangan n Kebakaran/ Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		
23	Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
	output : Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan		
24	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota															

<p>output : Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</p>	<p>Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota</p>		<p>Dokumen</p>		<p>Dokumen</p>		<p>Dokumen</p>		<p>Dokumen</p>		<p>Dokumen</p>		<p>Dokumen</p>		
--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

b	Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran															
	output : Terlaksananya inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang di Inspeksi	Persentase Pembinaan PenyidikPersentase Peralatan Proteksi kebakaran yang di Inspeksi		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
1	Sub Kegiatan : Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran															
	output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
2	Sub Kegiatan : Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran															
	output : Tersedianya Dokumen yang memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
3	Sub Kegiatan : Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran															
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		
4	Sub Kegiatan : Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan															
	output : Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		
5	Sub Kegiatan : Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran															
	output : Terlaksananya Penyusunan Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		

c	Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran														
	output : Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Pembinaan PenyidikPersentase Kejadian kebakaran yang di Investigasi		100%	10,429,400	100%	13,591,900	100%	23,591,900	100%	23,591,900	100%	23,591,900	100%	23,591,900
1	Sub Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
	output : Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi LanjutanMeliputi Penelitian dan Pengujian		12 Dokumen	10,429,400	12 Dokumen	13,591,900.00	12 Dokumen	23,591,900.00	12 Dokumen	23,591,900.00	12 Dokumen	23,591,900.00	12 Dokumen	23,591,900.00
2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
	output : Terlaksananya penyusunan Laporan yang memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	
3	Sub Kegiatan : Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran														
	output : Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	
4	Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran														
	output : Terlaksananya Laporan Lanjutan penyebab kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	
d	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran														
	output : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pembinaan PenyidikPersentase kegiatan Pemberdayaan dalam pencegahan Kebakaran		100%	69,413,550	100%	73,709,750	100%	73,709,750	100%	73,709,750	100%	73,709,750	100%	73,709,750

1	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
	output : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	69,413,550	100 Orang	73,709,750.00	100 Orang	73,709,750.00	100 Orang	73,709,750.00	100 Orang	73,709,750.00	100 Orang	73,709,750.00	
2	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
	output : Tersedianya Dokumen Pemberitahuan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan		Desa/ Kelurahan	-	Desa/ Kelurahan	-	Desa/ Kelurahan	-	Desa/ Kelurahan	-	Desa/ Kelurahan	-	
3	Sub Kegiatan : Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana														
	output : Tersedianya Dokumen yang memuat SKKL Pada Desa/ Kelurahan yang telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
4	Sub Kegiatan : Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran														
	output : Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	orang		orang		orang		orang		orang		orang		
5	Sub Kegiatan : Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana														
	output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	unit		unit		unit		unit		unit		unit		
6	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran														

	output : Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat setiap Tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya		orang		orang		orang		orang		orang		orang	
7	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
	output : Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa atau Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan	
e	Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia														
	output : Terlaksananya Penyelamatan Kejadian yang membahayakan keselamatan manusia	Persentase Pembinaan Penyidik Persentase Penyelamatan Kejadian yang membahayakan keselamatan manusia		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														
	output : Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		Laporan		Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-
2	Sub Kegiatan : Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi														
	output : Terlaksananya penyusunan Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-

3	Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi															
	output : Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal		Laporan		Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
4	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi															
	output : Terlaksananya penyediaan sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		Unit		Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
5	Sub Kegiatan : Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran															
	output : Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Picket dan Penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		
6	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar															
	output : Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		
7	Sub Kegiatan : Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar															

	output : Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar secara Berkala (setiap Tahun), Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
8	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar														
	output : Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
9	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)														
	output : Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa secara diperbaharui atau diMutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan Real time terintegrasi serta dapat digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat menjangkau masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	
					11,029,850,000	10,591,936,000	9,487,673,000	9,647,073,400	9,629,053,100	11,404,292,900					

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap Program Prioritas yang memiliki urgensi tinggi, berikut uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan memberikan dampak luas pada masyarakat.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
			Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	
			Peningkatan Kapasitas SDM PolPP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional PolPP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	
			Peningkatan Kapasitas SDMSatuan Pelindungan Masyarakat	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, danPengawasan	
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
			Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	

			Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
			Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
			Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	

			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Pembentukan Sekretariat PPNS	
			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
			Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
2.	Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan	Terciptanya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	
			Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
			Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
			Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	

			Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
			Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	
			Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Investigasi Kejadian Kebakaran	

			Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	
			Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	
			Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
			Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	

			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	
			Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut adalah target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025-2029, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

**Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen		95%	95%	98%	100%	100%	100%	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Persen	87,31	72,2	75	77	79	80	81	
2.	Nilai SAKIP Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Persen	B (61,80)	B (68,43)	B (68,50)	BB (75,68)	BB (75,70)	BB (75,75)	BB (75,80)	
3.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	25%	95%	95%	98%	100%	100%	100%	

4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	26,06%	26,23%	26,46%	27,78%	34,85%	35,29%	35,45%	
----	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2025-2029, yang memuat sasaran-sasaran strategis dan target kinerja spesifik guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah di tahun-tahun mendatang.

4.4.1 Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Indikator Kinerja Kunci dirancang untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat. Berikut tabel yang memuat indikator kinerja kunci:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	50%	75%	80%	80%	90%	90%	100%	
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	97%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	85%	75%	75%	80%	85%	90%	100%	
6	Waktu tanggap (Respon time) Penanganan Kebakaran	Menit	8,35	15	15	15	15	15	15	

4.4.2 Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi acuan untuk mengukur kinerja dan memastikan terpenuhinya standar pelayanan dasar kepada masyarakat dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Berikut tabel penetapan target SPM:

Tabel 4.6
Penetapan Target Indikator SPM

NO.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Trantibumlinmas								
1.1.	Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran								
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		97,78%	75%	75%	80%	85%	90%	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis memuat pelaksanaan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, disusun sesuai dengan tahapan dan melibatkan semua unsur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang berpedoman pada target RPJMD dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Agar terjadi keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu, setiap target yang akan dicapai disesuaikan dengan target RPJMD.

Dalam rangka memastikan pencapaian target-target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 maka perlu adanya pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 akan berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari seluruh komponen di OPD dan stakeholder yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan target-target Renstra dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, Sekretaris, Kepala Bidang, Para Kasubbag, Para Kepala Seksi. Selain itu, partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan DPRD sangat diperlukan.

Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran – saran untuk perbaikan pada berikutnya.

Benteng, 25 September 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,**

**SAPARUDDIN, S. Sos., M.M
Pangkat : Pembina TK. 1, IV/b
NIP. 19760901 200502 1 004**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI

RENCANA AKSI RENSTRA 2025-2029 SATPOL PP DAMKAR DAN PENYELAMATAN

PROGRAM	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR SUB. KEGIATAN	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban yang ditangani	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
	Melaksanakan koordinasi dengan Camat Lurah/Kades		Terwujudnya Rasa Aman dan Tentram dalam Masyarakat	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
	Melaksanakan Pelatihan/Bimtek			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	
	Melaksanakan Koordinasi/kerjasama			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	
	Menyusun SOP Ketentraman dan ketertiban Umum			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	
	Melaksanakan Pelatihan/Bimtek			Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP	
	Melaksanakan Pelatihan/Bimtek			Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional PolPP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan kejabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	
	Melaksanaan pendataan Anggota satlinmas			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis	
	Kerjasama dengan Instansi terkait					
	Melaksanakan Pelatihan/Bimtek					

Pembentukan Tim Patroli Cipta Kondisi		Pencegahan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Pelaksanaan Patroli Cipta kondisi
Pembentukan Tim Pengawasan			Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan
Pembentukan Tim Pengamanan Aset Vital			Pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini
Pembentukan Tim Penanganan Unjuk Rasa			
dan Pembentukan Tim Monitoring Anggota Satlinmas			
Koordinasi dengan Instansi terkait		Penindakan atas Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Pelaksanaan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa
Penganganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
Koordinasi dengan Instansi terkait		Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas
Melaksanakan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota			
		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
		Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Melaksanakan koordinasi dengan Camat, Lurah dan Desa		Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenraman, Ketertiban Umum dan
Menyusun peta rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum			
Menyediakan layanan Informasi Publik		Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum
Melaksanakan koordinasi dengan		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas
Melaksanakan Pelatihan/Bimtek			
Melakukan Rapat Internal Bidang terkait	Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Menyusun Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan			
Membuat Surat Tugas Kegiatan Pembinaan			
Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan			

Membuat Laporan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan				
Melakukan rapat internal Bidang terkait inventarisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas			Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Membuat draft Surat Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
Melakukan Konsultasi ke Bagian Hukum				
Menyusun draft final Surat Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
Menyerahkan draft final Surat Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah hasil Perbaikan ke Bagian HUKUM SETDA untuk diundangkan			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah
Menerima Laporan Pengaduan Masyarakat/ Informasi terkait dugaan terjadinya Pelanggaran Perda/Perkada yang dituangkan dalam Laporan Pengaduan/Laporan Kejadian			Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
melakukan registrasi Laporan Pengaduan/Laporan Kejadian pada buku Registrasi				
membuat Surat Tugas Penyelidikan				
Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan (WASMATLITRIK)				
Membuat Laporan Hasil Penyelidikan (WASMATLITRIK)				
			Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Penyidikan oleh PPNS			Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda
Menyusun Rencana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Perda dan Perkada				
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan				
Membuat Surat Penyampaian/ Koordinasi dengan Pemerintah setempat Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perda/Perkada				
Membuat Undangan Kegiatan Sosialisasi Perda/Perkada				

	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perda/Perkada				
	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perda/Perkada				
	Melaksanakan Kegiatan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP
	Melaksanakan Kegiatan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada				
	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah/Perkada			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan				
	Penyediaan Dokumen Implementasi			Implementasi Penegakan Perda dan	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan
	Penyusunan Draft SK Bupati Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS
	Melakukan Konsultasi ke Bagian Hukum SETDA				
	Menyerahkan draft SK Bupati ke Bagian				
	Inventarisasi Kebutuhan Kerjasama sesuai kebutuhan dengan mendasari Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
	Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait (Stakholder) terkait Kerjasama Kelembagaan terkait Perda/Perkada				
	Melakukan Penandatanganan MoU dengan				
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah
	Penyediaan Anggaran Diklat Pembentukan PPNS				
	Pembentukan PPNS dengan mengirimkan				
	Penyediaan Anggaran Operasional Sekretariat PPNS			Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS melalui Keikutsertaan pada Diklat Teknis, Diklat Struktural dan Diklat Fungsional			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Damkar Keliling 2. Pemasangan Baliho Pencegahan Kebakaran 3. Penyebaran Poster Pencegahan Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Pembinaan Penyidik Persentase Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya
	1. Pelaksanaan Piket Siaga Kebakaran 2. Pelaksanaan Pemadaman Kebakaran				
	1. Pelaksanaan Piket Siaga 2. Pelaksanaan Penyelamatan Korban Kebakaran 3. Pelaksanaan Penyelamatan Korban			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi
	1. Edukasi dan Sosialisasi Pengenalan dan Penanganan Limbah B3 2. Penanganan Darurat			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan

1. Identifikasi Kebutuhan Sarpras 2. Pemeliharaan dan Evaluasi Sarpras 3. Pelaporan dan Koordinasi			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan
Diklat Pemadam			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1. Perencanaan Komunikasi dan Pelatihan			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan
2. Monitoring Pemutakhiran				
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem
2. Penyusunan Dokumen RISP KP				
Pendidikan dan Pelatihan pejabat			Peningkatan kompetensi pejabat	Jumlah laporan hasil
1. Koordinasi Penyusunan Kajian RISP KP			Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran
2. Penyusunan Kajian RISP KP				
Pelatihan dan Pengembangan			Penyelenggaraan Jabatan	Jumlah dokumen hasil
Penyusunan Dokumen RISP KP			Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelamatan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran				
3. Pengadaan alat penunjang				
Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga			Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
Koordinasi Penyusunan Kajian Akademis RISP KP			Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISP KP)	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISP KP)
Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Penanganan Darurat			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi Pemutakhiran RISP KP			Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Pelaksanaan Ujian Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran			Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi
Penyusunan SOP Pelayanan Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
1. Pelaksanaan Piket Siaga Kebakaran 2. Pelaksanaan Pemadaman Kebakaran			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah
Koordinasi Penguatan Kelembagaan			Penguatan Kelembagaan Pemadam	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan
Pendataan Alat Proteksi Kebakaran yang dipersyaratkan	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi kebakaran yang di Inspeksi	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
Pemeriksaan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Pendataan Alat Proteksi Kebakaran yang dipersyaratkan			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Diklat Inspeksi Proteksi Kebakaran			Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
Pendataan dan Pemeriksaan secara berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Pelaksanaan Investigasi Penyebab Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang di Investigasi	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian
Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				
Diklat Investigasi Kebakaran				

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran				
1. Pemadam Goes To School/Campus	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Persentase kegiatan Pemberdayaan dalam	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi
2. Pemadam Masuk Desa			Pembentukan dan Pembinaan	Jumlah Desa/Kelurahan yang
Pelaksanaan Pembentukan dan Pelaksanaan Koordinasi Penyediaan Sarana dan PraSarana			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar
Pelaksanaan Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran			Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran
Pelaksanaan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya
Pelaksanaan Pembentukan dan Pelatihan Redkar			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran
1. Pelaksanaan Piket Siaga Penyelamatan 2. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelamatan Kejadian yang membahayakan keselamatan manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia
1. Identifikasi Kebutuhan Sarpras 2. Pemeliharaan dan Evaluasi Sarpras 3. Pelaporan dan Koordinasi			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian
Diklat Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal
Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
1. Pelaksanaan Piket Siaga Penyelamatan 2. Pelaksanaan Penyelamatan Korban Kebakaran 3. Pelaksanaan Penyelamatan Korban			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Monitoring dan Pendataan Kebutuhan Sarpras Pemadam Kebakaran			Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait
1. Perencanaan Komunikasi dan Pelatihan		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di
2. Monitoring Pemutakhiran				

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
												penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -
												koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang diampu		1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -
												Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -
									Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terwujudnya Layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		89 Orang	Rp 7,950,000,000	89 Orang/Bulan	Rp 4,998,707,440	89 Orang/Bulan	Rp 4,998,707,440	89 Orang/Bulan	Rp 4,998,707,440	89 Orang/Bulan	#####	89 Orang/Bulan	#####	89 Orang/Bulan	Rp 4,998,707,440
												Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	Rp 9,500,000	12 Dokumen	Rp 2,846,000	12 Dokumen	Rp 5,000,000	12 Dokumen	Rp 5,000,000	12 Dokumen	Rp 5,000,000	12 Dokumen	Rp 5,000,000	12 Dokumen	Rp 10,000,000
												Pelaksanaan Penata Usahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	Rp 9,500,000	1 Dokumen	Rp 1,860,000	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,000,000
												Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	Rp 9,500,000	Dokumen	Rp -	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	Rp -
												Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	Rp 9,500,000	1 Laporan	Rp 2,000,000	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,000,000
												pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	Rp 9,500,000	Dokumen	Rp -	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	Rp -

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		1 Laporan	Rp 10,500,000	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 10,000,000
												Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	Rp 9,500,000	Dokumen	Rp -	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	Rp -
										ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	Rp 9,500,000	Dokumen	Rp -	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	Rp -
												Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	Rp 9,500,000	Dokumen	Rp -	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	Rp -
												Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	Rp 10,500,000	Laporan	Rp -	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	Rp -
												Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	Rp 65,500,000	1 Laporan	Rp 34,460,000	1 Laporan	Rp 10,000,000	1 Laporan	Rp 20,000,000	1 Laporan	Rp 20,000,000	1 Laporan	Rp 34,460,000
												Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	Rp 10,500,000	1 Laporan	Rp 3,832,500	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 7,000,000
												Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Laporan	Rp 55,500,000	Laporan	Rp -	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	Rp -
												Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	Rp 9,500,000	Dokumen	Rp -	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	Rp -
									Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan prasarana disiplin				Unit	Rp -	Unit		Unit		Unit		Unit	Rp -
												Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan pakaian dinas beserta atribut				Paket	Rp -	Paket		Paket		Paket		Paket	Rp -
												Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Pendataan dan pengolahan administrasi		1	Rp 10,102,200	1 Dokumen	Rp 10,200,000	1 Dokumen	Rp 10,200,000	1 Dokumen	Rp 10,200,000	1 Dokumen	Rp 10,200,000	1 Dokumen	Rp 15,000,000

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
												Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi		Dokumen	-	Dokumen	Rp -	Dokumen		Dokumen	1	Rp 15,000,000	1	Rp 15,000,000	1	Rp 15,000,000	1	Rp 15,000,000
												Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai		12	Rp 36,375,400	12	Rp 36,375,000	12	Rp 20,000,000	12	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000	12	Rp 36,375,000	
												Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan		0	Rp -	Pegawai		Pegawai		Pegawai		Pegawai		Pegawai		Pegawai		Pegawai
												Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai meninggal dalam melaksanakan tugas yang dipulangkan		0	Rp -	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan
												Pemindahan tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan		0	Rp -	ASN		ASN		ASN		ASN		ASN		ASN		ASN
												Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi		0	Rp -	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang
												Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan		0	Rp -	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang
												Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		0	Rp -	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		6	Rp 19,948,000	6	Rp 19,948,000	6	Rp 19,948,000	6	Rp 20,000,000	6	Rp 20,000,000	6	Rp 20,000,000	6	Rp 25,000,000	
												Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor		6	Rp 19,313,000	6	Rp 19,312,000	6	Rp 15,000,000	6	Rp 18,000,000	6	Rp 18,000,000	6	Rp 18,000,000	6	Rp 25,000,000	
												Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga		0	Rp -	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket
												Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor		0	Rp -	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket
												Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		12	Rp 19,826,000	12	Rp 19,878,500	12	Rp 15,000,000	12	Rp 18,000,000	12	Rp 18,000,000	12	Rp 18,000,000	12	Rp 20,000,000	

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
												Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		0	Rp	-	12 Dokumen	Rp 4,200,000	12 Dokumen	Rp 3,000,000	12 Dokumen	Rp 3,000,000	12 Dokumen	Rp 3,000,000	12 Dokumen	Rp 5,000,000		
												Penyediaan bahan/ material	Jumlah Paket bahan/ material		0	Rp	-	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket			
												Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu		0	Rp	-	Laporan	Rp	-	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	Rp	
												Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	Rp 499,086,900	-	12 Laporan	Rp 499,085,000	12 Laporan	Rp 371,889,560	12 Laporan	Rp 366,247,360	12 Laporan	Rp 383,475,960	12 Laporan	Rp 500,000,000		
												Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		0	Rp	-	Dokumen	Rp	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	Rp	
												Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		0	Rp	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah unit kendaraan dinas	0	Rp	-	Unit		Unit		Unit		Unit		1 Unit	Rp 513,528,000	
												Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		0	Rp	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			
												Pengadaan alat besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan		0	Rp	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			
												Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan		0	Rp	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			
												Pengadaan mebel	Jumlah Unit Pengadaan mebel yang disediakan		1	Rp 28,149,000	-	1 Paket	Rp 28,491,000	1 Paket	Rp 20,000,000	1 Paket	Rp 20,000,000	1 Paket	Rp 20,000,000	1 Paket	Rp 20,000,000	1 Paket	Rp 35,000,000
												Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		0	Rp	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			
												Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan		0	Rp	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			
												Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan		0	Rp	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			

